

ANALISIS KONSEP PLURALISME ABDURRAHMAN WAHID PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM

Hamdani Khaerul Fikri

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram
haerul.fikri@gmail.com

Abstrak

Saat ini pendekatan pendidikan Islam berlangsung melalui proses operasional menuju pada tujuan yang diinginkan, memerlukan model yang melandasinya, sebagaimana yang pertama kali dibangun Nabi. Nilai-nilai tersebut dapat diaktualisasikan berdasarkan kebutuhan perkembangan manusia dan dipadukan dengan pengaruh lingkungan kultural yang ada, sehingga dapat mencapai cita-cita dan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia di segala aspek kehidupannya.

Untuk konteks Indonesia, antara model landasan dan lingkungan kultural (terutama konsep pluralisme) menemu pendekatannya konsepnya pada ide-ide Abdurrahman Wahid (Gus Dur), karena konsep pluralisme *ala* Gus Dur ini sebagian besar muncul dari realitas masyarakat Indonesia serta kecintaannya pada bangsa Indonesia, tidak terkecuali Islam.

Kata kunci : Pendidikan, konsep pluralisme, Abdurrahman Wahid

Pendahuluan

Pembenahan terhadap pendidikan Islam di Indonesia adalah suatu keharusan karena dalam beberapa dekade terakhir, pendidikan cenderung dijadikan alat pelanggeng kekuasaan. Hal ini terlihat saat Soeharto berkuasa dengan paradigma otoriter, diskursif, dan dominatif dalam berbagai segi kehidupan bernegara dan berbangsa. Berbagai perbedaan pandangan ditekan dan dikikis dan terkadang dianggap melawan pemerintah, sementara Islam sendiri sebenarnya menentang status quo yang tidak membawa perbaikan.

Runtuhnya rezim orde baru memberikan angin segar bagi alam demokrasi di Indonesia. Kebebasan yang sekian lama berada di balik tirai besi akhirnya lepas juga, namun kebebasan bukan berarti bebas tanpa aturan dan norma. Berbagai macam kerusuhan dan tindakan main hakim sendiri dengan dibungkus kertas” persoalan sosial ekonomi, politik dengan nuansa suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) yang cukup kental di berbagai belahan Indonesia misal: kerusuhan Poso, kerusuhan Sampit dan lainnya. Perbedaan pandangan, suku, ras dan agama kadang dijadikan alasan untuk pembelaan diri. Fenomena ini sangat disayangkan dan menandakan bahwa masyarakat telah kehilangan jati dirinya sebagai manusia yang berkemanusiaan dan berbudi. Penghormatan atas keberagaman belum dijunjung tinggi.

Pendidikan merupakan agen perubahan kebudayaan bagi masyarakat sekitar, mau atau tidak pendidikan Islam harus melakukan pembenahan. Hal ini merupakan tugas berat, di satu sisi kehidupan modern menuntut kemampuan intelektual untuk merespon secara positif dan kreatif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi tanpa harus melepaskan diri dari substansi dan prinsip-prinsip universal agama. Pluralitas masyarakat Indonesia, di sisi lain, juga menuntut sikap keberagaman yang inklusif dan toleran. Dengan menggunakan paradigma kontekstualisasi

pemikiran klasik, sikap-sikap itu –yaitu respon positif dan kreatif terhadap perubahan dan sikap keberagaman yang inklusif dan toleran– bisa diekspresikan secara nyata oleh Abdurrahman Wahid. Ia merupakan seorang tokoh budaya, agama, serta politikus yang mampu mempeluangi keragaman sekaligus seorang manusia yang mampu menikmati keragaman itu.

Abdurrahman Wahid salah satu tokoh yang peduli akan tegaknya pluralisme masyarakat bukan hanya terletak pada suatu pola hidup berdampingan secara damai, karena hal ini masih sangat rentan terhadap munculnya kesalahpahaman antar kelompok masyarakat yang pada saat tertentu bisa menimbulkan disintegrasi. Lebih dari itu, penghargaan terhadap pluralisme berarti adanya kesadaran untuk saling mengenal dan berdialog secara tulus sehingga kelompok yang satu dengan yang lain memberi dan menerima (*take and give*) serta bagaimana Islam memandang Islam, *ummah*, *jama'ah*, *ra'iyah*, *imamah*, *ukhuwah* dan seterusnya.

Ketidakpastian moral dan spiritual serta masih meluasnya sikap memandang segala sesuatu dari satu sudut pandang, dan itu pun umumnya berdasarkan kepentingan masing-masing. Harus ada kerendahan hati (*humility*) bahwa keunggulan komparatif yang dimiliki ajaran Islam hanya berguna apabila digunakan untuk kepentingan keseluruhan umat manusia, bukan hanya untuk kepentingan umat Islam itu sendiri. Belum berkembang wawasan keagamaan yang mengolah ajaran agamanya secara utuh, sehingga yang dicapai hanyalah pendalaman wawasan keagamaan yang bersifat parsial: keagungan agama melalui kuantitatif. Kalau pun diberlakukan ukuran kualitatif, hanyalah dalam dimensi normatif, seperti ketakutan akan dekadensi moral para remaja, erosi ukhuwah (persaudaraan) di kalangan sesama muslim. Kebenaran teologis serba mutlak dari ulama dijadikan satu-satunya acuan, dengan melupakan kebenaran nisbi dari semua agama dalam pandangan sejarah sebagai tolok ukuran universal.

Menurut Abdurrahman Wahid kelemahan pendidikan alternatif yang ditawarkan oleh Paulo Friere masih bersifat politis dalam konteks konfrontatif terhadap kekuasaan sehingga berkecenderungan memberontak kepada kekuasaan yang ada dan dengan sendirinya akan membawa kepada pukulan balasan dari kekuasaan itu dan ini tidak sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia yang tidak mudah menerima paradigma pertentangan kelas atau atas bawah. Sedangkan prof. Dr. Ahmad Syafi'i Ma'arif sebagai tokoh Muhammadiyah juga mengatakan bahwa Paulo Friere hanya mampu menjawab *freedom from what?* akan tetapi belum bisa menjawab *freedom for what?* padahal ini sangat penting bagi orang yang beragama, karena kita tidak hanya terikat oleh kepentingan dunia akan tetapi juga mempunyai keterikatan yang organik dengan dimensi *spiritual transendental* yang memungkinkan manusia berdialog secara intens dengan yang Tidak terhingga dan pendidikan Islam merupakan alternatif.¹

Abdurrahman Wahid mencoba tidak hanya menggunakan hasil pemikiran Islam tradisional namun lebih pada penggunaan metodologi teori hukum (*ushul al-fiqh*) dan kaidah-kaidah hukum (*qawaid fiqhiyah*) serta pemikiran kesarjanaan Barat dalam kerangka pembuatan suatu sintesis untuk melahirkan gagasan baru sebagai upaya menjawab perubahan-perubahan aktual.²

Seperti ditegaskan Nurcholish Madjid suatu generasi tidak bisa secara total memulai upaya pembaharuan dari nol, melainkan mesti bersedia bertaqlid, yang berarti melakukan dan memanfaatkan proses akumulasi pemikiran-pemikiran masa lalu.³ Namun, warisan-warisan masa lalu tidak sekedar dihargai, seka-

1 Ahmad Syafii Ma'arif, Pendidikan Islam sebagai Paradigma Pembebasan, Muslih Usa (ed.), *Pendidikan Islam di Indonesia Antara Cita dan Fakta* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991) hlm. 17-25

2 Umaruddin Masdar, *Membaca Pemikiran Gus Dur dan Amin Rais tentang Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 123.

3 *Ibid.*

ligus juga dihadapi secara kritis agar lahir pemikiran-pemikiran kreatif. Tanpa adanya penghargaan terhadap warisan keilmuan klasik maka proses pemiskinan kultural akan terjadi.

Suatu keharusan bagi umat Islam jika dididik untuk mengenal dinamika sosial, kultural, politik, perokonomian, dan dinamika edukasinya sendiri. Mereka harus dididik untuk bisa mendialogkan kemaslahatan umat dan hak demokratisasinya serta diberi kesempatan dengan menghilangkan kesan didekte. Abdurrahman Wahid mengatakan: bahwa sejarah sepenuhnya menunjukkan bahwa kebesaran Islam bukan karena ideologi atau politik tapi justru melalui tasawuf, perdagangan, dan pengajaran. Jadi antar tingkat kualitas pendidikan dan ukhuwah Islamiah dapat menjadi umpan balik.⁴ Kalau tingkat pendidikan seseorang tinggi atau cara berpikirnya demokratis, tidak mudah menghakimi dan mampu menempatkan perbedaan pendapat sebagai kawan berpikir, maka umat Islam yang demikian akan semakin banyak memperoleh nilai tambah dalam hidupnya dan sejumlah alternatif untuk menemukan kebenaran dan memecahkan berbagai problem sosial krusial.

Landasan Teori

1. Pluralisme

Kemajemukan bangsa Indonesia baik suku, ras, agama maupun perbedaan pandangan dan pendapat dalam melihat realitas merupakan kekayaan dan kebanggaan tersendiri yang tidak dimiliki bangsa lain. Namun dengan keragaman akan perbedaan itu sering membawa kepada disintegrasi bangsa, karena *truth claim* dari kelompok satu kepada kelompok lain akan memicu perang ide dan ujung-ujung sampai pada perang fisik. Untuk mengindari hal itu maka diperlukan kearifan, toleransi, tenggang rasa, dan dialog

⁴ Abdurrahman Wahid, *Islam di Tengah Pergulatan Sosial* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993), hlm.133

antar masyarakat (jangan dilupakan kita sebagai bangsa terlanjur heterogen dan pluralistik).

Dengan munculnya kelompok intelektual yang serba mau memformalkan Islam dikuatirkan Islam akan kehilangan relevansinya⁵ sebagai *rahmatan lil 'alamiin*. Keunggulan komparatif yang dimiliki ajaran Islam hanya berguna apabila digunakan untuk kepentingan keseluruhan umat manusia.⁶

Alwi Shihab mempunyai pandangan tentang pluralisme yaitu *pertama*, pluralisme tidaklah semata-mata menunjuk pada kenyataan tentang adanya kemajemukan, namun keterlibatan secara aktif terhadap realitas majemuk tersebut. Hal ini akan melahirkan interaksi positif. *Kedua*, pluralisme bukan kosmopolitanisme karena kosmopolitanisme menunjuk pada suatu realitas dimana keanekaragaman agama, ras, bangsa hidup berdampingan di suatu lokasi, namun interaksi positif yang berkembang di dalamnya sangat minim dan malah tidak ada sama sekali. *Ketiga*, pluralisme tidak sama dengan relativisme karena konsekuensi dari relativisme agama adalah munculnya doktrin bahwa semua agama adalah sama, hanya didasari pada kebenaran agama walaupun berbeda-beda satu sama lain tetapi harus diterima. Seorang relativisme tidak mengenal adanya kebenaran universal yang ada pada agama. *Keempat*, pluralisme agama bukan sinkretisme yakni untuk menciptakan agama baru dengan menggabungkan unsur-unsur tertentu dari beberapa agama menjadi satu integral dalam agama baru.⁷

Sedikitnya ada tiga sikap masyarakat dalam menghadapi perbedaan pandangan baik agama, budaya, maupun idiologi,⁸ yaitu:

5 Abdurrahman Wahid, *Prisma Pemikiran Gus Dur* (Yogyakarta: LKiS, 1999), hlm. 196.

6 Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan* (Yogyakarta: Desantara, 2001), hlm. 180.

7 Alwi Shihab, *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama* (Bandung: Mizan 1997), hlm. 41-42.

8 Budhy Munawar Rahman, *Pluralisme dan Teologi Agama-agama Islam-Kristen*, Tn. Sumartana, dkk., *Pluralisme, Konflik dan Pendidikan Agama di Indonesia* (Yogyakarta: Interfedie, 2001), hlm. 176-187.

- a. Sikap eksklusif: dalam pandangan ini setiap kelompok menyatakan pandangannya yang paling benar, superior dan satu-satunya jalan keselamatan hanya milik kelompoknya, sedangkan di luarnya tidak ada keselamatan, tidak benar dan inferior serta harus dimatikan. Dalam pola ini konflik dan kekerasan tidak dapat dihindari karena setiap kelompok merasa superior dan yang paling benar. Hubungan yang terjadi antara kelompokpun merupakan relasi-konflik dan klaim-klaim kebenaran bersifat absolut adanya.
- b. Sikap inklusif: dalam pola ini masing-masing kelompok berusaha menahan diri dan menghindari konflik. Sikap menghormati, toleransi dan dialogpun sudah berjalan meskipun bersifat sederhana. Kelompok lain tidak dilihat sebagai ancaman dan masing-masing kelompok diberi kebebasan untuk melakukan peribadatan. Dalam pola ini belum ada saling menerima pendapat positif dari kelompok lain.
- c. Sikap pluralis: paradigma ini percaya bahwa setiap agama mempunyai jalan keselamatan. Perbedaan agama maupun budaya tidak menghalangi proses dialog dan kerjasama antara mereka. Proses dialog dimaksudkan untuk saling mengenal dan saling menimba pengetahuan dan mencari persamaan-persamaan dalam rangka menyelesaikan masalah bersama seperti, keadilan, HAM, kemiskinan, kebodohan dan sebagainya serta melakukan kerjasama. Dalam tujuan dialog bukan berusaha mencari benar atau salah tetapi yang terpenting adalah mencari titik temu. Dan kebenaranpun bersifat relatif, sikap pluralis merupakan pengembangan yang lebih liberal dari sikap inklusif.⁹ Masing-masing kelompok berusaha saling mengoreksi dirinya dan kesediaan untuk menerima pendapat kelompok lain secara rasional dan profesional serta memandang kelompok lain sebagai partner.

⁹ Alwi Shihab, *Islam Inklusif...*, hlm. 41

2. Pendidikan Islam

Tugas yang diemban oleh pendidikan adalah mewariskan nilai-nilai luhur budaya kepada peserta didik sebagai upaya membentuk kepribadian yang intelek serta bertanggung jawab. Dengan kata lain pendidikan merupakan usaha pewarisan nilai-nilai yang dimiliki oleh suatu masyarakat kepada generasi selanjutnya. Dengan melalui pendidikanlah nilai-nilai luhur tersebut termasuk didalamnya nilai-nilai luhur agama, idiologi, budaya dari suatu bangsa akan ditransformasikan kepada generasi penerus dan menjadi bagian dari kepribadiannya.

Adapaun yang dimaksud dengan pendidikan Islam adalah sebagaimana Yusuf Qordhowi mengatakan Pendidikan Islam adalah pendidikan manusia seutuhnya; akal dan hatinya; rohani dan jasmaninya; akhlaq dan ketrampilannya. Karena itu Pendidikan Islam menyiapkan manusia untuk hidup baik dalam keadaan damai maupun perang, dan menyiapkannya untuk menghadapi masyarakat dengan segala kebaikan dan kejahatannya, manis dan pahitnya.¹⁰

Secara lebih teknis Endang Saifudin Anshari memberikan pemaknaan bahwa Pendidikan Islam sebagai proses bimbingan (pimpinan, usulan, tuntutan) oleh subyek didik (guru) terhadap perkembangan jiwa (perasaan, pikiran, kemauan, intuisi), dan raga obyek didik (siswa) dengan bahan-bahan materi tertentu, pada jangka tertentu, dengan metode tertentu dan dengan alat perlengkapan yang ada ke arah terciptanya pribadi tertentu disertai evaluasi sesuai dengan ajaran Islam.¹¹

Pengertian di atas lebih cenderung memberikan arti bahwa proses pendidikan (Islam) merupakan bimbingan kepada anak didik, bukan mempunyai konotasi otaritatif dari pihak guru. Den-

10 Yusuf al Qordlowi, *Pendidikan Islam dan Madrasah Hasan al Banna*, terj. Bustami A. Gani dan Zainal Abidin Ahmad, (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), hlm. 157.

11 Endang Saifuddin Ashari, *Pokok-pokok Pikiran tentang Islam* (Jakarta: Usaha Enterprise, 1976), hlm. 85.

gan bimbingan anak didik lebih memiliki ruang gerak yang luas sehingga dapat mengaktualisasikan potensi diri, sedangkan posisi guru hanyalah sebagai fasilitator.¹² Karena beragamnya siswa dengan karakter kejiwaan yang berbeda antara siswa satu dengan lainnya, maka sekolah haruslah mampu menciptakan suasana yang dapat menumbuh kembangkan daya kreativitas siswa dengan segala perbedaannya. Pendidikan yang bebas dari diskriminasi dan primordial (tanpa membedakan latar belakang keluarga, siswa, dan jenis kelamin serta warna kulit).

Adapun tujuan pendidikan Islam yakni untuk mencapai pertumbuhan kepribadian manusia yang menyeluruh secara seimbang melalui latihan jiwa, intelek, diri manusia yang rasional; perasaan dan indera. Karena itu pendidikan harus mencakup pertumbuhan manusia dalam segala aspeknya: spiritual, intelektual, imajinatif, fisik, ilmiah, bahasa, baik secara individual maupun kolektif, dan mendorong semua aspek ini ke arah kebaikan dan mencapai kesempurnaan. Tujuan akhir pendidikan muslim terletak pada perwujudan ketundukan yang sempurna kepada Allah baik secara pribadi, komunitas, maupun seluruh umat manusia.¹³

3. Konsep Pluralisme Abdurrahman Wahid

Masyarakat Indonesia yang plural, dengan ragam budaya, suku, etnis dan agama serta idiologi merupakan kekayaan tersendiri. Oleh karena itu, keragaman agama, etnis, idiologi ataupun budaya membutuhkan sikap arif dan kedewasaan berpikir dari berbagai lapisan masyarakat, tanpa memandang agama, warna kulit, status sosial dan etnis. Tanpa ada sikap saling curiga dan berprasangka buruk terhadap kelompok lain, kita sebagai bangsa sudah terlanjur majemuk dan konsekuensinya adalah adanya penghormatan atas pluralitas masyarakat itu.

Abdurrahman Wahid mengatakan demi tegaknya pluralisme

¹² Azumardi Azra, *Pendidikan Islam...*, hlm. 5

¹³ *Ibid.*, hlm. 57.

masyarakat bukan hanya terletak pada suatu pola hidup berdampingan secara damai, karena hal itu masih rentan terhadap munculnya kesalahpahaman antar-kelompok masyarakat yang pada saat tertentu bisa menimbulkan disintegrasi.¹⁴ Namun harus ada penghargaan yang tinggi terhadap pluralisme itu, yaitu adanya kesadaran untuk saling mengenal dan berdialog secara tulus sehingga kelompok yang satu dengan yang lain saling *take and give*.¹⁵

Latar belakang paham keislaman tradisional –*paham ahlussunnah wal jama'ah*– serta pemikirannya yang liberal, Islam menurut Abdurrahman Wahid harus tampil sebagai pemersatu bangsa dan pelindung keragaman dan mampu menjawab tantangan modernitas sehingga Islam lebih inklusif, toleran, egaliter dan demokratis. Nilai Islam yang universal dan esensial lebih diutamakan dari pada legal-simbolis, Islam mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa membawa embel-embel¹⁶ Islam akan tetapi ruh keislaman menyatu dalam wajah nasionalisme, seperti pribumisasi Islam, nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia, prinsip humanis dalam pluralitas masyarakat, dan prinsip keadilan dan egaliter.

Analisis Konsep Pluralisme Abdurrahman Wahid Perspektif Pendidikan Islam

Penulis sadar bahwa Abdurrahman Wahid bukanlah seorang to-

14 Umaruddin Masdar, *Membaca Pemikiran Gus Dur dan Amin Rais tentang Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 139.

15 Abdurrahman Wahid, *Pluralisme Agama dan Masa Depan Indonesia*, makalah pada seminar agama dan masyarakat, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, 20-November 1992. Umaruddin Masdar. *Membaca Pemikiran...*, hlm. 145.

16 Islamisasi bukan proses Arabisasi tetapi Islamisasi lebih mengutamakan pada manifestasinya nilai-nilai Islam dalam kehidupan. Selama ini proses Islamisasi belum dipahami betul oleh sebagian besar kaum muslim, hal ini terlihat misalnya: kata saudara tidak perlu diganti ikhwan, langgar diganti mushola, sembahyang diubah menjadi shalat. Hal ini terlihat bahwa proses Islamisasi baru pada visualisasi: ketidak-pedean umat Islam.

koh pendidikan¹⁷namun ide-ide progresif dan wawasan keislaman serta kecintaannya terhadap budaya Indonesia tidak diragukan lagi. Ia salah satu tokoh yang telah memberikan sumbangan besar bagi NU yaitu: melakukan dobrakan dengan ide-ide progresif dan terkadang liberal. Ia berusaha mengkombinasikan antara pemikiran Islam klasik (dunia pesantren) dengan dunia Barat (*liberal*). Gus Dur pengetahuan dan pengalamannya di dunia pendidikan cukup lama.

Menganalisa pemikiran dan ide-ide Gus Dur sebagian besar muncul karena melihat realitas masyarakat Indonesia serta kecintaannya pada bangsa Indonesia, tak terkecuali Islam. Lembaga pendidikan merupakan bagian kecil dari masyarakat dan cerminan cita-cita masyarakat. Oleh karena itu proses transformasi nilai-nilai kebangsaan dan religius seharusnya dimulai dari bangku pendidikan, dari TK sampai pada perguruan tinggi dan lembaga pendidikan yang lainnya.

Tantangan yang terus datang bertubi-tubi terhadap Islam secara umum dan lebih khusus terhadap Pendidikan Islam dalam menyikapi perkembangan zaman dengan permasalahannya yang semakin kompleks dan kemajuan iptek di sisi lain. Pertama, upaya pemahaman ajaran Islam yang lebih lebih inklusif, toleran dengan mempertimbangkan umat, perkembangan zaman, budaya setempat. Kedua, kualitas SDM yang dihasilkan belum dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Dengan demikian perlu ditinjau ulang lembaga pendidikan dan proses pengajaran, baik mengenai alat, metode, orientasi maupun metodologi serta pendekatan yang digunakan selama ini.

Dengan demikian problem yang dihadapi umat Islam dan lembaga pendidikan bukan suatu pekerjaan yang mudah. Hal ini me-

¹⁷ Jarang ditemukan bahkan hampir tidak ada tulisan Abdurrahman Wahid yang membahas dunia pendidikan secara rinci namun kebanyakan tulisannya ditujukan kepada keislaman dan kemasyarakat serta kebudayaan baik itu mengenai demokrasi maupun HAM.

merlukan keseriusan dan kerja keras dari semua pihak serta usaha yang melelahkan dan memakan waktu yang panjang. Dengan demikian hal ini merupakan suatu keharusan, oleh karena itu usaha pembenahan Pendidikan Islam harus terus dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Berangkat dari pemikiran Gus Dur dalam menyikapi pluralitas masyarakat Indonesia, penulis mencoba menemukan ide-idenya dan berusaha memahami ide-ide tersebut dan lebih lanjut dianalisa guna dijadikan telaah dalam menyikapi nasib dunia Pendidikan Islam yang semakin tidak menentu. Adapun ide-ide Abdurrahman Wahid telah dijelaskan pada bab III, selanjutnya penulis mencoba menganalisa ide-ide Abdurhaman Wahid untuk dijadikan masukan bagi dunia Pendidikan Islam. Ada beberapa hal yang perlu ditekankan dalam proses pengajaran Pendidikan Islam di Indonesia yaitu:

a. Paradigma Agama: Antara Inklusif dan Eksklusif

Sikap atas keragaman pemahaman keagamaan telah dicontohkan oleh para imam madzab terdahulu. Perbedaan cara pandang terhadap ajaran Islam mereka sikapi dengan rasa hormat dan toleransi. Karena pemahaman yang berbeda itu menjadi kekayaan tersendiri dan merupakan khazanah intelektual peradaban Islam. Hal ini menjadi perhatian bagi generasi sekarang apakah kita terima adanya atau perlu dikaji dan didialogkan dengan kondisi riil masyarakat: modern dan globalisasi.

Kalau memang Islam itu *rahmatan lil alamin* yang cocok untuk semua zaman dan tempat maka sudahkah ajaran Islam dapat menjawab problem sosial masyarakat saat ini. Dalam menjawab kebuntuan umat di atas maka dibutuhkan jawaban yang dapat menyejukkan umat, oleh karena itu diperlukan rekontruksi pemahaman agama yang sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini. Dengan demikian paradigma pemahaman keagamaan yang eksklusif, intoleran sudah selayaknya dikubur dalam-dalam karena tidak relevan dalam kehidupan masyarakat yang plural.

Seorang eksklusivis cenderung berusaha memonopoli kebenaran, tertutup, tidak mau mendengar dan memahami orang lain, dan kecenderungan bersikap otoriter. Sikap monopoli kebenaran pada gilirannya membuat seseorang mempunyai hak istimewa untuk menentukan mana agama yang benar dan mana yang sesat. Sikap sekelompok orang muslim tertentu yang memandang *syi'ah* sebagai aliran sesat dan karena itu dilarang hidup di Indonesia merupakan contoh empiris monopoli kebenaran.¹⁸ Kecenderungan ini memperlihatkan mudahnya seseorang menghukumi orang lain dengan kejam dan tidak manusiawi. Paradigma hitam-putih, benar-salah, surga-neraka, telah menyelimuti umat beragama selama berabad-abad. Fenomena ini menggambarkan bahwa di kalangan umat Islam sendiri belum adanya sikap terbuka terhadap perbedaan orang Islam lainnya lebih-lebih terhadap agama lain.

Kalau cara pandang demikian masih tetap dipertahankan oleh umat Islam di Indonesia saya tidak yakin Islam akan menjadi *rahmat* bagi orang muslim sendiri, lebih-lebih *rahmatan lil 'alamin*. Oleh sebab itu yang dibutuhkan umat saat ini adalah pemahaman ajaran Islam yang lebih inklusif baik intern maupun ekstern umat beragama serta pemahaman yang lebih memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan.¹⁹

Peran Pendidikan Agama sangat urgen dalam pemberantasan eksklusifitas keagamaan di Indonesia. Hal ini dikarenakan pendidikan merupakan wadah yang paling efektif dan efisien dalam upaya melakukan transformasi nilai-nilai kemanusiaan dan religius kepada peserta didik mulai dari bangku TK sampai pada perguruan tinggi. Selama ini praktik Pendidikan Agama Islam

18 Sumartana, *Pluralisme...*, 228.

19 Kebijakan MUI tentang pengharaman selamat natal kepada umat Nasrani merupakan bukti masih nampaknya pemahaman keagamaan yang eksklusif di kalangan muslim. Lantas apakah dengan ucapan selamat natal atau selamat idul fitri menjadi seseorang pindah agama. Padahal penciptaan iklim yang damai dan aman lebih penting dari itu semua.

masih bersifat kaku dan sentralistik. Hal ini terlihat dari pola pembelajaran yang masih bersifat mendekte siswa, siswa harus sama²⁰ dengan guru ketika berbeda dengan atas (guru, kepala sekolah, pemerintah) siswa diberi label salah, berdosa dan terkadang dibarengi sikap curiga dan sentimen.

Berkaitan dengan hal di atas terlihat jelas bahwa proses pendidikan agama lebih menekankan pada keselamatan yang didasarkan pada hubungan individu dengan Tuhannya dan kurang menekankan keselamatan didasarkan pada hubungan individu dengan individu lain. Perbedaan asumsi dasar dan filosofi cara memperoleh keselamatan ini menurut Amin Abdullah sangat besar sekali implikasi dan konsekuensinya dalam menyusun muatan materi dan silabi serta kurikulum Pendidikan Islam di sekolah-sekolah.²¹ Dan sangatlah wajar jika anak didik kurang begitu sensitif dan kurang peka terhadap nasib, penderitaan, kesulitan yang dialami oleh sesama, yang kebetulan berbeda dengannya.

b. Pendidikan Islam: Humanis dan Egalitarian

Konflik yang banyak terjadi di Indonesia membuktikan telah terjadi *missing link* antara pendidikan agama dan dengan pendidikan nilai. Oleh karena itu perlu adanya penambahan kurikulum Pendidikan Islam yang sifatnya universal: nilai-nilai *humaniora* (kemanusiaan). Penambahan nilai-nilai universal dalam pendidikan bukan berarti ingin menonjolkan sifat-sifat liberal Pendidikan Islam namun dimaksudkan dengan pemahaman terhadap nilai-nilai universal anak didik akan dapat mengejawantahkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan bermasyarakat.

20 Hal ini pernah terjadi pada penulis ketika melakukan PPL II di sekolah negeri di Yogyakarta di mana materi yang harus disampaikan harus sesuai dengan pemahaman keagamaan guru sekolah padahal penulis tahu bahwa siswa beraneka ragam.

21 Amin Abdullah, Pengajaran Kalam dan Teologi di Era Kemajemukan: sebuah Tinjauan Materi dan Metode Pendidikan Agama, *Jurnal Tashwirul Afkar*, Edisi 11 Tahun 2001, hlm. 13.

Kemanusiaan menjadi agenda penting dalam proses pendidikan. Karena pendidikan tidak saja berkaitan transfer pengetahuan yang sifatnya keilmuan namun ada sisi lain yang lebih penting dari pendidikan yaitu suatu proses internalisasi nilai kepada anak didik. Oleh karena itu fokus pendidikan tidak hanya terletak pada aspek kognitif semata namun aspek afeksi dan psikomotor menjadi agenda penting yang tidak dapat dikesampingkan. Manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa dan dengan orang lain.

Dari pernyataan di atas ada sebuah pertanyaan yang cukup menggoda: bagaimana praktik Pendidikan Islam –dalam hal ini pelaksanaan pengajaran– telah mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan? Ataukah sebaliknya. Di sinilah peran Islam sebagai agama yang dianut oleh mayoritas bangsa Indonesia menjadi urgen untuk memulai dan menerapkan pendidikan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan serta kesetaraan tanpa ada diskriminasi.

Proses pembelajaran (materi agama) yang berlangsung di sekolah selama ini lebih bersifat eksklusif. Hal ini terlihat proses pembelajaran yang tidak memberikan ruang pada siswa untuk berbeda pendapat dengan guru. Ketika siswa berbeda dengan guru maka dengan mudah diberi label dosa dan ancaman neraka. Materi pelajaran agama (Islam) bernada penyeragaman yang tidak sesuai pluralitas siswa itu sendiri. Pendidikan Islam lebih cenderung pada proses indoktrinisasi tunggal tentang kebenaran yang tidak dapat dibantah lagi.

Ruang kelas bagaikan penjara tanpa peluang kreatif dan inovatif. Hal ini terlihat dari tujuan pendidikan membentuk kepribadian muslim berakhlak mulia dan seterusnya. Tujuan ini diberlakukan untuk semua jenis, jenjang, bidang studi. Pendidikan hanyalah keinginan atasan (guru dan para elit penguasa) bukan sebaliknya pendidikan untuk membimbing dan mendampingi

peserta didik dengan segala problem kehidupan dan keadaan masyarakat di mana ia berada.

Siswa sebagai layaknya manusia mempunyai kebebasan mengekspresikan potensi yang dimilikinya: berpikir kritis, inovatif serta kreatif, namun justru potensi ini dipasung di lembaga pendidikan. Kekerasan sistemik di ruang kelas mengisyaratkan kemanusiaan belum diperhatikan, siswa dianggap mesin fotocopy yang harus mengikuti kemauan atasan dan materi pendidikan agama berupa instan yang datang dari penguasa. Meletakkan siswa pada obyek pendidikan bukan pada subyek pendidikan dengan sendiri akan mematikan posisi manusia yang secara kondrati berpotensi untuk berkembang. Dengan begitu peran sekolah berubah fungsi melakukan pendampingan kepada peserta didik tetapi lebih pada menciptakan manusia-manusia mesin/robot. Kalau model pembelajaran masih seperti itu maka penciptaan manusia Indonesia yang seutuhnya (insan kamil) hanya utopia belaka.

Ada semacam kecenderungan mempertahankan konsep-konsep pendidikan agama yang lama (yang dianggap telah teruji dan mujarab) dipercayai pasti jauh lebih baik. Dan keenganan untuk mengambil konsep yang baru (aktual) yang lebih baik dan sesuai dengan tuntutan zaman dan pluralitas masyarakat. Proses belajar harus lebih melibatkan keaktifan belajar siswa yang berbeda latar belakang ternyata memberi pengaruh positif dari pada pola penyeragaman perlakuan terhadap mereka. Pola pembelajaran yang cenderung satu arah (monolitik) dari pihak guru justru menjadikan siswa jenuh dan kurang bisa menghormati pendapat temannya yang berbeda dengan dirinya – tidak adanya diskriminasi terhadap siswa yang berbeda. Pola yang demikian akan menyebabkan siswa mendapatkan kekayaan wawasan pengetahuan yang kemudian terjadi proses berpikir panjang untuk menentukan pilihan-pilihan dalam mengambil sikap.

c. Demokratisasi Pendidikan

Lembaga pendidikan di berbagai negara termasuk Indonesia merupakan alat penguasa untuk melanggengkan kekuasaannya. Kebijakan-kebijakan yang diambilpun bersifat sentralistik: berasal dari atas bukannya kebijakan diambil dari bawah yaitu: melalui proses komunikatif dan akomodatif yang memihak rakyat. Dengan kata lain pendidikan tidak lagi mendewasakan dan membebaskan manusia dari penindasan. Demi tegaknya demokratisasi pendidikan maka campur tangan penguasa (pemerintah) harus hindari, bukan sama sekali ditiadakan. Peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam institusi pendidikan yaitu sebagai fasilitator. Sedangkan pada dataran praktis berkaitan dengan pelaksanaan dan penyusunan materi diserahkan kepada kepada rakyat dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat.

Pendidikan merupakan sebuah proses di mana manusia menemukannya eksistensi diri: proses berpikir, berpendapat dan seterusnya merubah hidupnya lebih bermakna dan beradab. Sistem sentralisasi yang selama ini dijalankan dinilai telah menyumbat daya kritis dan kreatifitas anak didik. Hal ini terlihat dalam Pendidikan Agama Islam: guru sebagai sentral yang selalu benar, lengkap bebas kritik dan siswa pada posisi bawah harus sesuai dengan atas. Dengan demikian tugas Pendidikan Islam adalah menumbuhkan kembangkan potensi peserta didik dengan daya kreatifitas yang dimilikinya.

Dalam berdemokrasi kita harus melindungi dan menghormati mereka yang minoritas. Dengan demikian lingkungan Pendidikan Islam harus membiasakan berbeda pendapat. Perbedaan pendapat merupakan hal yang biasa dalam memahami agama, karena hasil apapun pemahaman manusia tentang ajaran bersifat relatif adanya. Dengan cara demikian maka akan terjadi untuk menghormati nilai-nilai pluralitas manusia.

Membiasakan anak didik untuk berpikir secara kritis, anali-

sis, inovatif dan kreatif: mendialogkan pengetahuan yang didapat di bangku sekolah dengan realitas empiris masyarakat. Sehingga dengan demikian akan terjadi proses perenungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan realitas sosial akan memungkinkan siswa tumbuh dengan penghormatan atas pluralitas yang unik. Dengan demikian anak didik akan terus mendialogkan pengetahuan dengan perkembangan zaman.

d. Penuh Etika dan Moral

Pendidikan agama sebagai upaya transformasi nilai-nilai religius yang penuh dengan moralitas dan etika kemanusiaan terjebak pada formalisme simbol-simbol keagamaan yang semu yaitu: rutinitas dan keajekan beribadah, dan belum dapat menyentuh etika (moral) sosial secara umum. Dengan demikian pendidikan agama belum menyentuh pada substansi dan esensi dari nilai-nilai religius yaitu penuh dengan kesalehan sosial dengan tidak mengenyampingkan ibadah yang bersifat *ubudiyah*. Padahal ruh Pendidikan Islam terletak dalam nilai-nilai religius.²²

Seperti yang dikatakan al Attas bahwa tujuan Pendidikan Islam adalah menciptakan individu yang beradab yaitu: individu yang sadar akan individualitasnya dan hubungan yang tepat dengan diri, Tuhan, masyarakat dan alam sekitar baik yang tampak maupun yang gaib.²³ Dengan kata lain seorang individu mempunyai tanggung jawab dengan Tuhan atas tindakannya serta bertanggung jawab secara moral dengan masyarakat (sosial), dan alam semesta.

Jadi, adanya upaya memadukan kesalahan personal dan kesalahan sosial: keselamatan insaniyah, kemaslahatan basyariyah, serta keselamatan alam. Pendidikan tidak semata memicu kecer-

22 Selalu mengambil kebijakan dengan pikiran dingin dan kearifan budi pekerti serta dilandasi dengan nilai-nilai kemanusiaan. Manusia yang selalu bisa menggunakan nalarnya secara benar dan obyektif dan menentukan pilihan tepat dan menolak cara kekerasan. Kecerdasan dan kearifan bersumber dari daya kritis dan kesadaran atas nilai diri dan sosial, sehingga tumbuh kepedulian pada sesama.

23 M. Naquib al Attas, *Filsafat...*, hlm. 189.

dasar yang bersifat kognitif semata, tetapi juga aspek afektif dan psikomotorik yaitu: perilaku kongrit terhadap sosial kemasyarakatan.

Reorientasi Paradigma Pendidikan Islam

Di era globalisasi dan modernisasi yang ditandai dengan kemajuan teknologi, komunikasi, media elektronik yang tidak mungkin dibendung lagi. Manusia harus menghadapi kemajuan teknologi dengan segala dampak yang ditimbulkan. Dalam hal ini Pendidikan Islam dihadapkan pada pilihan yang sulit antara mempertahankan sistem pendidikan yang lama yang sarat dengan materi-materi yang sifatnya eskatologis atautkah melakukan terobosan baru guna membekali anak didik dalam menghadapi globalisasi?

Kalau umat Islam masih cenderung mempertahankan paradigma salaf maka penulis yakin Pendidikan Islam akan ditinggalkan oleh masyarakat. Karena model ini lebih cenderung menonjolkan aspek kognisi bersifat menghafalkan materi-materi pelajaran agama sehingga produk yang dihasilkan tidak lebih seperti robot yang mampu bekerja sesuai dengan *remote control* (pendidik). Proses pendidikan berlangsung secara monolitik (seragam) kurang mengembangkan daya kritis, kreatif dan inovatif. Oleh karena itu harus ada reorientasi paradigma pendidikan agama Islam yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat dengan tidak meninggalkan inti ajarannya. Dalam hal ini peran pendidikan tidak lain yaitu menyiapkan anak didik mampu mengadaptasikan dengan perkembangan zaman dengan dampak yang ditimbulkannya. Anak didik tidak hanya akan cukup dibekali dengan materi-materi namun lebih dari itu dibutuhkan penguasaan metodologi.

Ada empat tradisi psikologi kognitif yang mewarnai proses pembelajaran saat ini, yaitu: *behaviorisme*²⁴, *developmental*²⁵, *infor-*

²⁴ Tradisi *behaviorisme* mencerminkan proses pembelajaran dari perubahan tingkah laku dari belum tahu menjadi tahu. Materi pelajaran disusun berdasarkan hirarki dari yang sederhana ke yang lebih kompleks.

²⁵ Tradisi ini menunjukkan perkembangan intelektual manusia mengalami beberapa tahapan. Maka dianjurkan cara penyampaian materi pelajaran disesuaikan dengan tingkat perkembangan intelektual peserta didik.

*mation processing*²⁶, dan *constructivisme*. Namun hanya dua (*behaviorisme* dan *developmental*) yang diimplementasikan dalam pendidikan di Indonesia secara intensif.²⁷ Sutrisno²⁸ mengatakan bahwa tradisi *konstruktivisme* memandang belajar sebagai proses aktif seseorang dalam membangun pengetahuan yang bermakna dalam dirinya sendiri melalui interaksi dengan lingkungannya dengan cara membangun keterkaitan antara pengetahuan yang sedang dihadapi dan pengetahuan yang dimiliki. Dengan kata lain terjadinya proses dialog dan perenungan antara pengetahuan yang diperoleh (siswa didik) dari pendidikan dengan realitas empirik-budaya masyarakat setempat.

Untuk menuju pada pendidikan agama Islam yang mengargai pluralisme selain perubahan pada materi-materi yang tersusun dalam silabi seperti yang disebutkan di atas, juga harus dilakukan perubahan pendekatan dalam pengajaran. Pola-pola lama dalam pendekatan agama harus dirubah dengan model baru yang lebih mengalir dan komunikatif dengan tidak mengenyampingkan perbedaan peserta didik. Dengan demikian pola penyeragaman harus ditinggalkan karena menggingat keunikan peserta didik harus tetap tumbuh sebagai upaya menumbuhkan daya kerativitas. Adapun pendekatan-pendekatan tersebut antara lain sebagai berikut: *Pertama*, pendekatan historis. Pendekatan ini berusaha mengajak manusia untuk menukik dari alam idealis ke alam yang bersifat empiris dan mendunia.²⁹ Dengan demikian dalam pengajaran agama Islam guru harus menyampaikan secara detail sampai

26 Tradisi ini belum secara keseluruhan diterapkan di lembaga pendidikan di Indonesia karena memerlukan biaya yang mahal. Tradisi *information processing* memerlukan sarana komputer.

27 Leo Sutrisno, *Pluralisme, Pendidikan Pembelajaran dalam Tradisi Konstruktivisme*, Th. Sumartana, *Pluralisme Konflik dan Pendidikan Agama di Indonesia* (Yogyakarta: Interfidei, 2001), hlm. 210.

28 *Ibid.*, hlm. 211.

29 Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 47.

pada akar-akarnya: berkaitan dengan isi, asbabun nuzul/asbabul wurud, kapan, di mana dan hikmah dari ayat atau hadist tersebut.

Penelusuran sejarah menjadi titik tekan dan dikemukakan secara terbuka dan jujur dengan senantiasa membuka diri untuk berbeda pendapat. Sejarah dikemukakan sebagai fakta, bukan sebagai kemestian yang harus diikuti dan dibenarkan. Apa yang baik dalam sejarah harus dikatakan baik dan apa yang buruk dikatakan buruk. Penilaian diserahkan kepada peserta didik sedangkan pendidik sebagai penyampai berita.

Pendekatan historis ini sebenarnya merupakan pendekatan yang mencoba mendekati kejadian-kejadian di masa lampau yang biasanya mensejarah kemudian dikonfrontasikan dengan norma-norma yang ada. Dalam konfrontasi ini kadang-kadang yang dikatakan dalam kitab suci berlainan dengan apa terjadi sehingga menimbulkan semacam *confuse* tersendiri, bukan hanya bagi siswa namun juga pendidik. Tetapi itu realitas yang harus dikemukakan.

Kedua, pendekatan sosiologis. pendekatan ini berusaha melihat keadaan masyarakat serta berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan.³⁰Dengan pendekatan ini diharapkan ada proses kontekstualisasi atas apa yang pernah terjadi di masa sebelumnya. Kontekstualisasi ini dalam pemikiran Islam dapat disebut ijtihad (inovasi/pembaharuan) atas apa yang dulu pernah dipahami. Dengan pendekatan sosiologi akan membawa materi Pendidikan Agama Islam pada umumnya lebih aktual. Keaktualan materi bukan karena dibuat-buat tetapi lebih berdasarkan keterangan-keterangan yang senantiasa ada dasar argumentasinya dan dikemukakan secara terbuka.

Pendekatan sosiologi secara tegas menolak pengajaran dengan pola indokrinasi tetapi lebih menekankan kerangka berpikir kontekstual kekinian, dengan ini ada peluang siswa untuk saling menghormati dan toleran terhadap pluralisme. Pendekatan

³⁰ Mastuhu, *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam* (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 49

doktrinal dogmatikal cenderung menekankan pada pembelaan-pembelaan atas apa yang dikatakan kitab suci. Pendekatan sosiologi tidak demikian, kitab suci tetap sebagai rujukan tetapi dengan melihat realitas kondisi masyarakat yang berbeda dengan masyarakat di mana kitab suci diturunkan.

Ketiga, pendekatan kultural. Pendekatan ini dimaksudkan untuk mengajak siswa memahami apa yang sebenarnya menjadi tradisi dan mana yang otentik (orisinil). Pendekatan ini berusaha melihat campur aduknya tradisi Arab dan nilai ajaran agama yang orisinal, sehingga masih banyak umat Islam salah memahami mana yang tradisi Arab dan mana yang ajaran Islam.

Tumpang-tindih antara tradisi Islam dan *pure* Islam menjadi agenda yang harus dipikirkan pendidik karena jika terus-menerus dibiarkan akan menyebabkan tumbuhnya tradisi-tradisi yang dianggap ajaran Islam. Dengan pendekatan ini akan menolong siswa untuk dapat membedakan mana yang tradisi dan mana yang ajaran Islam sehingga siswa memiliki sikap menghargai tradisi-tradisi yang berbeda-beda serta melanggengkan tradisi yang baik dan meninggalkan jika memang tidak perlu diikuti.

Keempat, pendekatan psikologis. Pendekatan ini dimaksudkan bahwa materi pelajaran diberikan sesuai dengan perkembangan kejiwaan anak didik. Di mana setiap siswa dilihat sebagai manusia yang mandiri dan *unique* dengan karakter dan kemampuan yang dimiliki. Dengan pendekatan ini anak didik menjadi manusia pembelajar yang dengan segala informasinya akan dapat secara progresif mengorganisasikan dan memperkaya apa-apa yang sudah diketahui dan bukan malah mematakannya. Pendidik dalam hal ini tidak memperhatikan aspek kognisi dalam keberhasilan intelektual tetapi lebih pada mengorientasikan pada fakta-fakta yang terjadi di lingkungan sekitar.

Untuk menyiapkan peserta didik di era modern: yang multi etnik, multi kultural dan multi religius menurut mastuhu pen-

didikan harus merubah cara belajar dari model warisan menjadi cara belajar problem solving (pemecahan masalah), dari hafalan ke dialog, dari pasif ke heuristic, dari penguasaan materi sebanyak mungkin ke penguasaan metodologi, dari mekanis ke kreatif, dari memandang dan menerima ilmu sebagai hasil final yang mapan menjadi memandang dan menerima ilmu sebagai proses, dan fungsi pendidikan hanya mengasah dan mengembangkan akal namun mengelola dan mengembangkan hati dan keterampilan.³¹

Dengan demikian Pendidikan Islam berusaha mengoptimalkan tiga ranah (kognisi, afeksi dan psikomotor) sekaligus serta aspek sosial. Proses pembelajaran harus dimaknai sebagai upaya mengantarkan anak didik untuk berpikir (*learning to think*), untuk berbuat (*learning to do*), untuk menjadi (*learning to be*), serta untuk hidup bersama dengan orang lain (*learning to live together*). Jadi, dalam hal ini pendidikan agama Islam merupakan proses menyeimbangkan antara kebutuhan individu dengan kebutuhan sosial-kemasyarakatan.

Kesimpulan

Indonesia adalah salah satu bangsa di dunia yang memiliki heteroginitas masyarakat baik dalam hal budaya dan lainnya, jika hal ini tidak dikelola dengan baik maka akan menjadi mala petaka yang dahsyat. Di satu sisi pluralitas masyarakat dapat menjadi kekuatan jika dikelola dengan baik dan profesional, namun jika tidak, perbedaan cara pandang antar individu bangsa yang plural menjadi faktor penyebab disintegrasi bangsa dan konflik yang berkepanjangan. Kerusakan dan kekerasan yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini menunjukkan bahwa keragaman itu belum dapat dikelola dengan baik. Fenomena ini (kekerasan) menunjukkan masih belum adanya sikap yang arif dan bijak dari elemen masyarakat Indonesia untuk mengormati perbedaan baik yang bersifat intern maupun ekstern.

³¹ *Ibid.*, hlm. 39

Sikap yang tepat menurut Abdurrahman Wahid dalam menghadapi pluralitas masyarakat baik pluralitas agama maupun budaya serta pluralitas etnik adalah menempatkan setiap kelompok masyarakat setara dengan kelompok lain dalam hal apapun tanpa ada diskriminasi dan ketidakadilan. Setiap warga masyarakat mempunyai kedudukan yang sama untuk berpendapat di muka umum, berkarya, beribadah, serta mendapatkan keadilan tanpa membedakan unsur agama, suku, jender, dan kewarganegaraan. Tiap kelompok masyarakat mempunyai kedudukan yang sama dalam hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam membangun Indonesia. Dengan rasa solidaritas, keterbukaan, toleransi dan dialog kita membangun Indonesia yang berbudaya dan beradab, aman dan damai. Menurut Abdurrahman Wahid nilai-nilai universal Islam lebih penting ketimbang formalisasi Islam yang hanya bersifat legalitas-simbolis, ia cenderung menutamakan substansi Islam karena dengan demikian nilai-nilai universal islam tidak hanya milik orang islam tapi juga milik non muslim seperti: demokrasi, keadilan, persamaan.

Bagi Gus Dur sikap kritis harus tetap dilakukan guna memberikan masukan bagi perbaikan kehidupan. Ia tidak hanya menggunakan pemikiran Islam tradisional tetapi keilmuan kesarjanaan Barat, keduanya saling melengkapi dalam rangka pemecahan masalah umat. Dengan demikian hukum Islam akan selalu dinamis dan dengan demikian tidak akan kehilangan relevansinya.

Pendidikan merupakan institusi dan media paling efektif dalam mengelola keragaman tersebut. Fungsi pendidikan tidak lain merupakan upaya transformasi nilai-nilai yang dimiliki suatu bangsa. Upaya penanaman nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan harus diupayakan baik di lingkungan keluarga, masyarakat maupun lingkungan pendidikan.

Pendidikan Islam yang merupakan sub sistem pendidikan nasional mempunyai andil yang cukup besar dalam upaya trans-

formasi nilai-nilai religiusitas kepada peserta didik, hal ini harus dimulai dari umat Islam, mengingat Islam sebagai agama mayoritas. Perubahan paradigma pendidikan Islam harus dilakukan. Hal ini dikarenakan paradigma yang selama ini dipakai ternyata lebih membentuk manusia yang egois, tertutup (eksklusif), intoleran, dan berorientasi pada kesalahan personal. Dalam menghadapi pluralitas masyarakat: multi etnik dan multi religi yang dibutuhkan adalah paradigma pendidikan yang toleran, inklusif dan berorientasi pada kesalahan sosial dengan tidak melupakan kesalahan individual.

Cara belajar pun harus dirubah dari metode ceramah menjadi problem solving, dari menghafal materi sebanyak-banyaknya menjadi penguasaan metodologi, dari mekanik menjadi organik, dari memandang ilmu sebagai hasil final menjadi memandang ilmu sebagai proses yang dinamis. Pendidik memandang anak didik sebagai pribadi otonom dengan segala potensi yang dimilikinya sehingga akan tercipta daya kreatifitas peserta didik. Dengan demikian demokratisasi pendidikan saat ini, dengan menempatkan kebijakan-kebijakan pendidikan yang berpihak pada nasib masyarakat di bawah. Dengan demikian pola penyeragaman dari atasan seharusnya berubah dengan pola yang mengedepankan kebutuhan rakyat (dalam hal ini siswa) di bawah. Materi pendidikan seharusnya mencakup nilai-nilai universal yang dimiliki agama diantaranya: nilai-nilai persamaan, keadilan, keterbukaan, kejujuran serta adab sopan santun.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Gaffar Karim, *Metamorfosis NU dan Politisasi Islam di Indonesia*, Yogyakarta: LKIs, 1995
 Abdurrahman an-Nahlawi, *Prinsip-prinsip dan Metode Pendidikan Islam*, Bandung: Diponegoro, 1989

- Abdurrahman Wahid, *Islam di Tengah Pergulatan Sosial*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993
- _____, *Membangun Demokrasi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999
- _____, *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan*, Yogyakarta: Desantara, 2001
- _____, *Prisma Pemikiran Gus Dur*, Yogyakarta: LKiS, 1999
- _____, *Tuhan Tidak Perlu Dibela*, Yogyakarta: LKiS, 1999
- Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999
- Ahmad Suaedy dan Ulil Abshar Abdalla, *Gila Gus Dur: Wacana Pembaca Abdurrahan Wahid*, Yogyakarta: LKiS, 2000
- Ahmad. D. Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, cet. 6, Bandung: Al Ma'arif, 1986
- Alwi Shihab, *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, Bandung: Mizan, 1997
- Amin Abdullah, dkk, *Tafsir Baru Studi Islam dalam Era Multi Kultural*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2002
- Azumardi Azra, *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Milinium Baru*, Jakarta: Logos, 2002
- Greg Barton, *Biografi Gus Dur*, Yogyakarta: LKiS, 2003
- Hasan Langgulong, *Beberapa Pemikiran tentang Pendidikan Islam*, Bandung: Al Ma'arif, 1980
- Kuntowijoyo, *Paradigma Islam, Interpretasi untuk Aksi*, Bandung: Mizan, 1991.
- Laode Ida dan A. Thantowi Jauhari, *Gus Dur diantara Keberhasilan dan Kenestapaan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada 1999
- Listiono Santoso, *Teologi Politik Gus Dur*, Yogyakarta: Ar Ruuz, 2004
- M. Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam: Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner* Jakarta: Bumi Aksara, 1994